

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KB DI DESA JURUG KECAMATAN

SOOKO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015-2017

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan Kampung KB yang ada di Desa Jurug. Pengertian implementasi adalah melaksanakan suatu kebijakan dari pemerintah yang dampaknya sampai kepada masyarakat, serta menunjukkan hasil tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi terdiri atas beberapa rangkaian Definisi Operasional yang akan menjadi acuan untuk menjelaskan tentang beberapa hasil wawancara yang ada di Lokasi penelitian . Pada Bagian ini, penulis akan menyampaikan berbagai respon dari pelaksana kebijakan, serta dari pihak masyarakat yang sudah merasakan implementasi kebijakan dari pemerintah, terkait dengan Kampung KB yang berada di Desa Jurug, kecamatan sooko, Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2015-2017 sebagai berikut yang meliputi :

1.Ukuran dan tujuan kebijakan :

Pada awal mulanya, Implementasi Kebijakan Kampung KB ini merupakan Kebijakan yang dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, kemudian diinstruksikan kepada Dinas Keluarga Berencana pusat, selanjutnya diinstruksikan lagi kepada Dinas Keluarga Berencana yang ada di berbagai Provinsi di Indonesia, kemudian Diinstruksikan lagi sampai ke beberapa Kabupaten. menurut hasil wawancara dengan Danan Prihantoko, selaku Kepala Desa Jurug, tujuan dari implementasi kebijakan Kampung KB yang ada di Desa Jurug yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta pembangunan di segala bidang yang meliputi:

1. Keluarga Muda (Pengantin yang sudah berkeluarga pada usia yang masih belia)
2. Home Industri
3. Infrastruktur

Jika penduduknya terlalu banyak, maka pembangunan untuk mensejahterakan rakyat pun akan tersendat. (Wawancara 20 Juni 2018)

Selanjutnya, dalam Pengimplementasian suatu kebijakan, hal yang juga harus diperhatikan adalah faktor penunjang yang fungsinya adalah untuk memberikan perhatian pada beberapa faktor dalam menentukan hasil kinerja.

Salah satu faktor pendorong lain yang dapat menjadikan berjalannya implementasi kebijakan adalah dengan memerhatikan darimana asal anggaran, serta berapa banyak jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pengimplementasian kebijakan Kampung KB ini. Dalam perihal anggaran, sudah dijelaskan oleh Seri Mulyono selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk bahwa : (Wawancara, 7 Juni 2018)

“Asal anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pengimplementasian kebijakan kampung KB pada tahun 2016 sampai 2017, yaitu sebesar Rp. 90.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”.

Salah satunya adalah pencaanangan program yang biayanya kurang lebih sekitar Rp. 26.145.000 . Biaya yang sebesar itu, telah diperjelas lagi oleh Muhammad Tono, selaku Kepala Seksi Advokasi dan Penggerak Kampung KB, bahwa biaya itu digunakan untuk

1. Konsumsi = $Rp.20.000 \times 500 \text{ orang} = Rp.10.000.000$

2. Penggandaan dan penjilidan buku profil Kampung KB = 5 eksemplar x Rp. 75.000 = 3.75.000

3. Sarana Penunjang (Gapura Kampung KB) = 1 paket x 15.770.000 = 15.770.000

Total Biaya = Rp.26.145.000

Sisanya masih digunakan untuk pelaksanaan program lain, yang masih berkaitan dengan Kampung KB, seperti halnya dalam pembagian kelompok kegiatan, yang meliputi

a.Bina Keluarga Balita

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan para orang tua yang mempunyai anak balita agar supaya bagaimana orangtua tersebut mampu untuk memerhatikan cara mengasuh anak dengan cara yang baik dan benar, sehingga diharapkan anak balita tersebut dapat tumbuh kembang menjadi anak yang bertakwa pada Tuhan yang maha esa, terampil dalam segala hal serta berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama

b.Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan langsung kepada anak-anak remaja atau kepada orang tua yang punya anak remaja tersebut dengan tujuan agar anak remaja dapat lebih memahami tentang bahaya pergaulan

bebas serta diharapkan para orang tua dapat lebih ekstra dalam mengontrol pergaulan anak pada usia remaja, dan pertemuan untuk mensosialisasikan itu belum tentu satu bulan sekali, terkadang juga dilaksanakan dalam jangka tiga bulan sekali

c. Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mensosialisasikan khusus untuk orang yang berusia diatas 50 tahun dan kegiatannya pun cukup sederhana, yaitu pengobatan, penyuluhan serta makanan tambahan untuk menunjang kesehatan lansia

d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Merupakan suatu gerakan sosialisasi yang tujuan utamanya adalah untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, mampu memajemen pendapatan penghasilan keluarga, serta bergerak aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Dari empat pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan daya minat masyarakat dalam mengikuti implementasi kebijakan Kampung KB dari pemerintah, serta anggaran dari pemerintah untuk menjadi faktor penunjang jalannya implementasi tersebut yang dikelola secara baik dan benar, agar program kebijakan itu dapat terealisasi dengan baik.

Hal ini kemudian diperjelas kembali oleh Danan Prihantoko, selaku Kepala Desa Jurug terkait manfaat diterapkannya Kampung KB yang ada di Desa Jurug. Beliau mengatakan: (Wawancara 20 Juni 2018)

“ Dengan diterapkannya Kampung KB, tentu ini dapat lebih mempermudah untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk yang ada di Desa Jurug, serta dapat lebih mudah dalam memajukan kemakmuran dan kesejahteraan keluarga ”.

Maka dari itulah mengapa Kepala Desa Jurug sangat senang dalam menyambut program dari pemerintah. Karena pada hakekatnya program tersebut sangat memberikan suatu keuntungan tersendiri bagi Masyarakat yang berada di pedesaan.

Selanjutnya, dalam pengimplementasian kebijakan Kampung KB yang ada di Desa Jurug, pasti ada yang namanya struktur implementator yang gunanya untuk membagi tugas dan tanggungjawab agar dalam setiap proses pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prosedur atau tahap-tahapan yang ada. Dalam hal pembagian tugas dan tanggungjawab, Danan Prihantoko selaku Kepala Desa Jurug mengatakan bahwa: (Wawancara, 20 Juni 2018)

“ Model struktur implementator di Desa Jurug secara resmi telah diputuskan oleh SK Kepala Desa. Selain sebagai penanggungjawab, Kepala Desa juga berperan sebagai motivator kampung KB ”.

Kemudian mengenai peran penting yang dijalankan oleh aparatur pelaksana itu sendiri ada beberapa peran dan tugas masing-masing struktur dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi Kepala Desa itu sendiri, Kader Kampung KB dan penyuluh. Sesuai dengan tupoksinya, Dana Prihantoko juga memberikan penjelasan atas peran masing-masing aparatur pelaksana yang meliputi: (Wawancara 20 Juni 2018)

“ Kepala Desa berperan sebagai penanggungjawab dan motivator jalannya program. Kader Kampung KB sebagai pemberi informasi serta pelaksana sosialisasi program dari pemerintah, dan penyuluh bertugas mendampingi Kepala Desa sebagai motivator serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan “

Dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Danan Prihantoko tersebut menjelaskan bahwasannya untuk mengimplementasikan jalannya implementasi kebijakan dari

pemerintah, maka dibentuklah beberapa implementator yang tujuannya untuk berbagi tugas dalam proses pelaksanaan implementasi. Mulai dari Kepala Desa yang bertugas menjadi penanggungjawab jalannya implementasi di Desa Jurugserta menjadi motivator peserta Kampung KB, Kader Kampung KB yang bertugas sebagai pemberi informasi dan mendata peserta serta yang terakhir adalah Penyuluh yang terlibat aktif untuk menyukseskan jalannya implementasi kebijakan Kampung KB.

1. Sumberdaya:

Selanjutnya untuk menyukseskan jalannya implementasi kebijakan Kampung KB dari pemerintah tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan pembagian tugas saja. Oleh karenanya, penting untuk Kampung KB dalam menyediakan tiga fasilitas untuk menunjang proses jalannya implementasi kebijakan. Maka dari itu, Danan Prihantoko selaku Kepala Desa Jurug memberikan penjelasan bahwa : (Wawancara 20 Juni 2018)

“ Untuk menunjang suksesnya implementasi kebijakan Kampung KB yang ada di Desa Jurug, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo diperlukan beberapa fasilitas agar pelaksana lebih mudah dalam menjalankan peran tugasnya “.

Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah, pada intinya fasilitas merupakan objek penting yang digunakan untuk memudahkan pelaksana dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Danan Prihantoko selaku Kepala Desa Jurug memberikan penjelasan terkait dengan apa sajakah fasilitas yang dibutuhkan untuk menjadi penunjang implementasi tersebut. Beliau mengatakan

“ Adapun fasilitas tersebut yaitu alat kesehatan dalam kegiatan posyandu balita, posyandu lansia dan alat kontrasepsi KB yang meliputi Timbangan, Obat-obatan dan Tensimeter ”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti membutuhkan yang namanya fasilitas atau alat penunjang yang gunanya untuk memberikan kemudahan dalam bekerja.

Dengan begitu, maka implementasi Kampung KB dapat menarik minat masyarakat untuk ikut dalam implementasi Kampung KB.

3.Karakteristik Agen Pelaksana

Setelah diadakannya implementasi kebijakan Kampung KB, Tatik Royani selaku masyarakat desa jurug mengatakan bahwa : (20 Juni 2018)

“ Perkembangan minat masyarakat untuk mengikuti program Kampung KB yang ada di Desa Jurug ini, masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti program dari pemerintah. ”

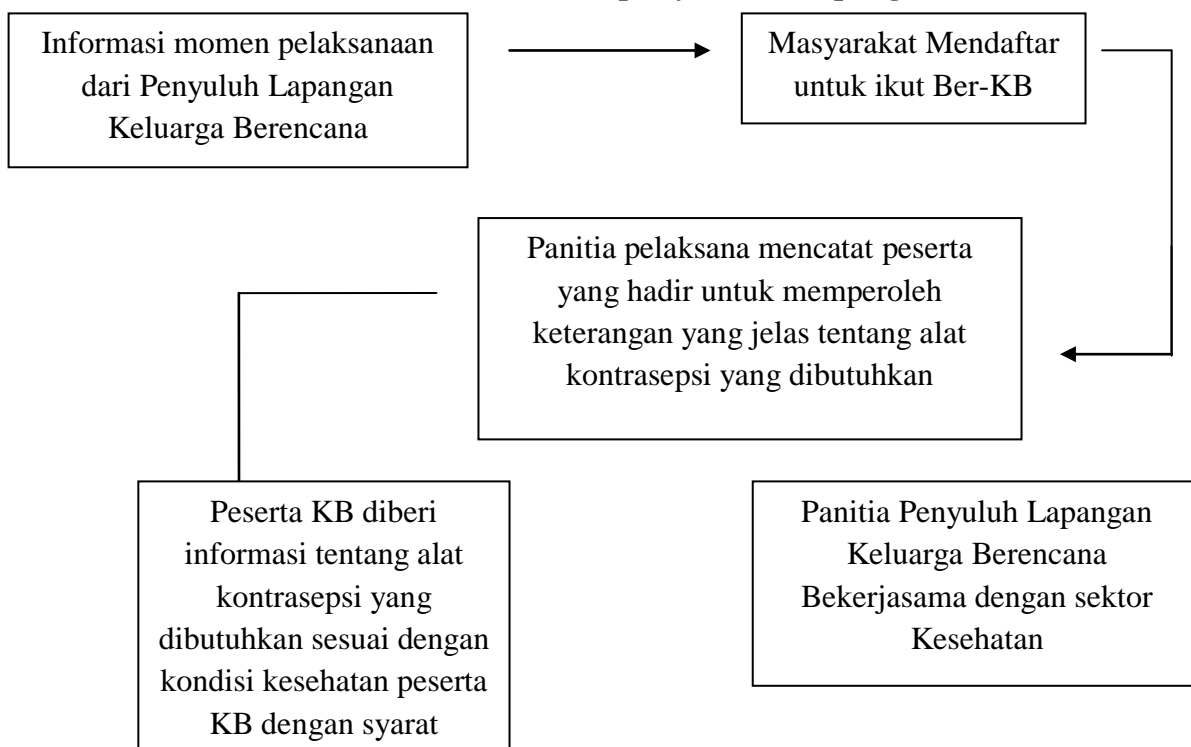
Ini adalah suatu bukti bahwa Implementasi Kampung KB dari pemerintah benar benar sangat diminati masyarakat untuk mengontrol jumlah kelahiran serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain sebagai peningkatan kesejahteraan keluarga yang sebagaimana mampu membentuk keluarga kecil yang bahagia, implementasi Kampung KB yang bekerjasama dengan berbagai lintas sektor antar instansi pemerintah juga mempunyai misi untuk mengimplementasikan agar bagaimana masyarakat itu sadar dalam menjaga kesehatan reproduksi serta yang paling utama adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak remaja agar orangtua lebih mampu dalam mengontrol pergaulan anak serta memberikan pendidikan akhlak kepada anak remaja.

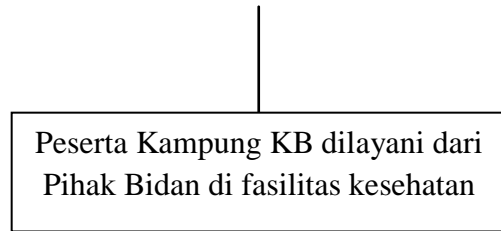
Selanjutnya dalam proses penerapan pelayanan Kampung KB kepada masyarakat, telah dijelaskan oleh Muhammad Tono, selaku Kepala Seksi Advokasi dan Penggerak bahwasannya :
(Wawancara 7 Juni 2018)

“ pelaksana kebijakan membuat sistem standar prosedur pelayanan yang tujuannya untuk mengatur sistem pelayanan Kampung KB yang tujuannya agar dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan pemerintah dapat terukur dengan baik “.

Dari pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memudahkan aparaturnya pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan hubungan sosial dan masyarakat dibentuklah prosedur pelayanan agar komunikasi aparaturnya pelaksana dan masyarakat dapat sinkron terkait dengan apa saja alat kontrasepsi yang dibutuhkan masyarakat peminat kampung KB, serta aparaturnya pelaksana bisa lebih mudah untuk mendata masyarakat yang menjadi peserta Kampung KB. Dari aparaturnya pelaksana implementasi Kampung KB itu sendiri, pelaksana kebijakan membuat standar prosedur yang meliputi:

Gambar: 1.2
Prosedur pelayanan Kampung KB





Sumber : Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015

Dengan begitu, maka implementasi kebijakan Kampung KB dapat terstruktur dengan baik. Sehingga, ini akan menjadikan nilai plus tersendiri bagi para aparatur pelaksana dalam menunaikan peran tugasnya sebagai implementasi kebijakan Kampung KB.

Hal tersebut kembali dipertegas oleh Danan Prihantoko selaku Kepala Desa Jurug terkait kesuksesan Dinas Keluarga Berencana dalam mengendalikan jumlah penduduk, bahwa (Wawancara 20 juni 2018)

“ dilihat dari capaiannya, sejauh ini kemampuan aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Kampung KB yang ada di Desa Jurug, aparatur pelaksana mampu melaksanakan program dengan baik, yaitu komunikasi yang bagus, harmonis dan kompak, karena banyak menerima berbagai prestasi ”.

Ini merupakan suatu bukti bahwa semakin kompak dan solid atas keprofesionalan aparatur pelaksana dalam menjalankan tugas di lapangan, makaini dapat menjadikan suatu capaian prestasi atas penyelenggaraan implementasi kebijakan Kampung KB. Beberapa torehan prestasi yang telah di dapatkan oleh aparatur pelaksana Kampung KB antara lain :

1. Kampung KB awards

2. Kejuaraan Keluarga Berencana

3. Kejuaraan Motivator KB pria

Yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan diperlombakan kedalam tingkat Provinsi.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan aparatur dari masing-masing struktur, gaya pelayanannya pun harus mampu menarik minat masyarakat maupun memberi kenyamanan dalam proses pelayanan Kampung KB tersebut. Budi Kuswantoro selaku masyarakat Desa Jurug kembali memberikan jawaban tentang bagaimana sikap aparatur pelaksana dalam melayani masyarakat peminat Kampung KB. Beliau mengatakan: (Wawancara, 20 Juni 2018)

“Petugas pelaksana harus supel, ramah tamah dan sopan. Sosialisasinya dapat langsung melalui perorangan atau melalui kelompok kegiatan masyarakat seperti halnya Arisan, Yasinan maupun Kerja Bakti “

Disisi lain, Suprihatin dari pihak masyarakat juga menambahkan atau mempertegas. Beliau mengatakan:

“Jadi intinya jika petugas pelaksana ingin mensosialisasikan Kampung KB yang sasarannya adalah masyarakat banyak, maka sosialisasi tersebut sudah pasti dilaksanakan di forum perkumpulan masyarakat. Namun jika petugas pelaksana hanya membutuhkan beberapa orang saja, maka diadakanlah sosialisasi secara perorangan, yaitu dengan cara mendatangi satu per satu rumah yang ingin disosialisasikan”.

Pernyataan tersebut merupakan suatu penjelasan bahwasannya penting bagi aparatur pelaksana untuk membaca situasi dan kondisi di lapangan terkait dengan cara mensosialisasi atau memberikan pemahaman kepada Masyarakat.

Dari dua pernyataan pihak masyarakat tersebut, pada intinya upaya semacam ini dilakukan dari pihak aparaturnya yang gunanya untuk memberikan pemahaman tentang Keluarga Berencana, Implementasi Kampung KB sampai pada pemahaman pentingnya masyarakat untuk mengikuti Program KB demi kesejahteraan keluarga sampai pertumbuhan ekonomi.

4.Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana:

Kampung KB yang telah diimplementasikan dari Pemerintah pusat sampai ke Desa Jurug, masyarakat Desa Jurug sendiri menyambutnya dengan penuh antusias setelah mendapatkan informasi atas kebijakan dari pemerintah ini. Budi Kuswantoro selaku tokoh masyarakat mengatakan : (Wawancara 20 Juni 2018)

“Reaksi Masyarakat pada awalnya belum terlalu paham bagaimana pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana ini, namun setelah mendapatkan informasi masyarakat menjadi paham bahkan sangat antusias untuk mengikuti Kampung KB ini. Selain itu, kelompok Tribina juga yang dapat menambah daya minat masyarakat untuk ber KB “

Kemudian untuk Tribina juga diperjelas kembali oleh Danan Prihantoko selaku Kepala Desa Jurug, beliau menambahkan pernyataan dengan mengatakan: (wawancara 20 Juni 2018)

“ Tribina merupakan upaya pemerintah Dinas Keluarga Berencana untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti Kampung KB. Tribina itu sendiri adalah suatu kegiatan yang meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Remaja. Selanjutnya mengenai Tribina itu sendiri juga mempunyai peran masing-masing ”.

Seperti yang telah dijelaskan pada halaman 64 dan 65 tentang apa dan bagaimana tribina itu, berikut adalah penjelasan sekaligus kesimpulan dari tribina. Tribina terdiri atas tiga kegiatan yaitu:

1. Bina Keluarga Lansia = Pembinaan bagi orang-orang yang berusia 50 tahun keatas, dan kegiatannya adalah Pengobatan, Penyuluhan dan makanan tambahan
2. Bina Keluarga Balita = Kegiatan lapangannya adalah mengundang seluruh orangtua yang punya anak balita untuk diadakannya posyandu, serta penimbangan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3. Bina Keluarga Remaja = Kegiatan lapangannya adalah membina para remaja dan orangtua yang punya anak remaja tersebut. Namun itu belum tentu sebulan sekali, terkadang juga dilaksanakan dalam jangka tiga bulan sekali “.

Yang sebagaimana itu berfungsi untuk menyejahterakan keluarga kecil yang bahagia.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah, sukses atau tidaknya juga dilihat dari kinerja aparatur pelaksana kebijakan. Karena sejatinya aparatur pelaksana itulah yang tentunya harus bermodalkan kepiawaian dan semangat kerja yang tinggi agar implementasi kebijakan dapat terealisasi dengan baik.

Disisi lain agar implementasi dapat terealisasi dengan baik, gaya aparatur pelaksana dalam melayani masyarakat pun juga sangat mempengaruhi kinerjanya. Karena sejatinya gaya pelayanan merupakan suatu modal pendukung proses jalannya implementasi agar minat masyarakat dalam mengikuti program pemerintah semakin besar. Menurut salah seorang narasumber dari pihak masyarakat yang bernama Suprihatin, beliau mengatakan: (Wawancara 20 Juni 2018)

“ Untuk gaya pelayanan dan cara aparatur pelaksana dalam melayani Kampung KB cukup ramah dan supel, karena sosialisasinya melalui perorangan, maupun dengan cara pertemuan di forum perkumpulan “

Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan Suprihatin tersebut bahwa proses pelayanan implementasi kebijakan Kampung KB di Desa Jurug memanglah sangat berkomitmen untuk menggalang peserta KB yang tujuannya untuk membangun kesejahteraan keluarga. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa dalam memberikan satu pemahaman khusus terkait dengan pentingnya mengikuti Program Keluarga Berencana memanglah harus dilakukan secara privat. Terutama bagi masyarakat yang belum terlalu faham tentang apa dan bagaimana Kampung KB itu dan manfaatnya mengikuti implementasi kebijakan yang diluncurkan dari pemerintah untuk masyarakat

5.Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana:

Selanjutnya hal penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan adalah memerhatikan betul keprofesionalan dalam bekerja yang salah satunya dengan membangun komunikasi antar aktivis pelaksana agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miss komunikasi. Maka dari itu, komunikasi dalam tahap-tahapan pembuat kebijakan sangatlah penting agar dapat terorganisir dengan baik. Sepertihalnya yang telah disampaikan oleh Muhammad Tono selaku Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerak, beliau mengatakan: (Wawancara 20 Juni 2018)

“ Untuk tahapan itu sendiri pengorganisasian diperoleh dari usulan dan masukan masyarakat, kemudian dibahas dan dimusyawarahkan oleh kader Pemerintah Desa dan Penyuluh lapangan KB “

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Tono tersebut dapat disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk membangun koordinasi yang baik, tujuannya agar dalam setiap kegiatan dapat terorganisir dengan baik. Selain itu peran penting dalam melaksanakan pengorganisasian adalah untuk menciptakan sikap demokratis kepada masyarakat dalam

menyikapi perbedaan usulan, karena di dalam forum rapat pasti ada salah seorang yang tidak sepakat dengan sistem yang akan dijalankan oleh aparatur pelaksana. Oleh karena itu maka dengan diadakannya sosialisasi pertemuan yang juga mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat, maka yang diharapkan adalah dapat lebih mampu dalam menyikapi beberapa pandangan masyarakat terkait dengan sistem atau cara aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakannya di Desa Jurug tersebut.

Kemudian Muhammad Tono selaku Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerak, beliau kembali memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana koordinasi yang diterapkan dalam implementasi Kampung KB tersebut agar dalam setiap proses jalannya implementasi Kebijakan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah miss komunikasi. Karena segiat apapun kita bekerja, secerdas apapun kita mengimplementasikan suatu strategi pelaksanaan kebijakan, jika dalam proses jalannya implementasi kebijakan itu kita mengalami miss komunikasi, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan akan berantakan dan tidak terarah. Maka dari itu, agar tidak terjadi miss komunikasi, penting bagi aparatur pelaksana untuk sering mengadakan evaluasi. Berdasarkan yang disampaikan Muhammad Tono beliau mengatakan: (Wawancara 7 Juni 2018)

“ Agar tidak terjadi miss komunikasi, kita semua mengadakan pertemuan rutin dan sosialisasi yang dilaksanakan setiap bulannya, yang gunanya untuk mengevaluasi yang diadakan oleh aparatur pelaksana “

Sesuai dengan tupoksi yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, peran penting dalam membangun koordinasi kepada sesama aparatur pelaksana dan koordinasi kepada Kepala Desa dan Masyarakat sangatlah perlu untuk diperhatikan pula. Terutama aparatur pelaksana yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan jalannya proses implementasi. Kemudian evaluasi

pada aparatur pelaksana juga dapat menjadikan suatu dukungan kepada masing-masing pribadi aparatur agar ketika ada implementasi maupun program terbaru, dapat lebih meningkatkan intensitas kerjanya. Disisi lain dengan diadakannya pertemuan rutin antar aparatur pelaksana maka ini dapat meminimalisir terjadinya miss komunikasi, syukur-syukur jika aparatur pelaksana sudah dapat bekerja total secara profesional.

6.Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik:

Selanjutnya, lingkungan juga termasuk dalam salah satu aspek yang wajib untuk dipertimbangkan dalam hal keberhasilan implementasi Kampung KB yang ditanggungjawab oleh aparatur pelaksana kebijakan. Dalam hal ini akan dijelaskan menurut pendapat dari dua narasumber yang berbeda. Sepertihalnya yang telah disampaikan oleh Muhammad Tono selaku Kepala Seksi Advokasi Dan Penggerak, beliau menjelaskan bahwa: (Wawancara 7 Juni 2018)

“ Sebelum terjun ke lapangan, para aparatur pelaksana diberikan bekal pelatihan dan pembelajaran, termasuk pembinaan yang secara rutin agar segala persiapan benar-benar matang “

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tono tersebut, pada intinya Penyuluh Lapangan KB selaku aparatur pelaksana pun juga mendapat arahan-arahan agar ketika sudah terjun ke lapangan aparatur pelaksana dapat dengan mudah menjalankan proses implementasi Kampung KB.

Namun ada satu hal dari proses implementasi kebijakan tersebut yang terkadang juga tidak mampu berjalan mulus. Karena faktanya di lapangan pun juga masih ada yang belum terealisasi, salah satunya karena faktor kendala dana yang keluar secara besar-besaran yang tidak teratur, sehingga dalam proses penganggaran pun terkadang juga tidak terukur dengan baik,

karena faktor pemborosan tersebut. Sesuai dengan apa yang sudah diwawancarakan dengan Danan Prihantoko selaku Kepala Desa Jurug, beliau mengatakan: (Wawancara 20 Juni 2018)

“ Kendala dari proses jalannya implementasi ini adalah karena faktor anggaran dana yang dikeluarkan dari Pemerintah masih kurang memenuhi untuk proses jalannya implementasi “.

Maksud dari pernyataan diatas memiliki arti bahwa menurut pernyataan dari Kepala Desa Jurug, aparatur pelaksana Kampung KB kurang mampu dalam manajemen anggaran dana pemerintah untuk melaksanakan pertemuan peserta Kampung KB dalam rangka motivasi dan penyuluhan. Selanjutnya yang menjadi faktor penyebab borosnya aparatur pelaksana dalam hal anggaran dana telah diperjelas kembali oleh Danan Prihantoko, yaitu

“ dikarenakan jumlah peserta yang terlalu banyak, serta Pemerintah sedikit boros dalam hal penggunaan anggaran. Salah satunya anggaran untuk pertemuan peserta Kampung KB yang akan dimotivasi “.

Dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan anggaran dana pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan implementasi kebijakan,

“ Maka dari itu seharusnya jika dalam penyelenggaraan pertemuan peserta yang gunanya untuk motivasi, seharusnya tidak mengeluarkan biaya “

Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, aparatur pelaksana seharusnya benar-benar memerhatikan dan mempertimbangkan betul terkait dengan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sekiranya memerlukan anggaran atau tidak. Namun menurut penjelasan dari Danan Prihantoko, selaku Kepala Desa Jurug tersebut akan lebih baik apabila ketika masih dalam proses sosialisasi, motivasi dan penyuluhan itu tidak

mengeluarkan anggaran yang terlalu banyak, dengan tujuan agar aparaturnya pelaksana tidak terkendala masalah dana ketika akan menjalankan implementasi kebijakan yang lainnya atau menjalankan implementasi lanjutan dari Kampung KB ini.